

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan tuntutan reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, perubahan tersebut di antaranya dengan lahirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Era Otonomi Daerah ditafsirkan sebagai penambahan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sebesar-besarnya diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan memberikan waktu yang panjang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Di mana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pada esensinya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional dalam menjalankan Pemerintah. Pembangunan daerah juga berarti kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya guna dan hasil guna untuk kemajuan daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki implementasi yang sangat besar. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional. Wujudnya adalah dilakukannya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk lebih menciptakan otonomi yang luas maka Pemerintah Pusat memberi kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah daerah terutama di bidang perhubungan, baik perhubungan darat, laut dan udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2004 kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan adalah :

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan dan pengaturan Eksplorasi, Konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Perairan di wilayah laut di luar Perairan 12 (dua belas) Mil, termasuk Perairan Nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen.
- b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 Mil.
- c. Penetapan dan kebijakan dan pengaturan batas-batas Daerah Otonom di laut dan batas ketentuan Hukum Laut Internasional.
- d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- e. Penegakan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 Mil dan di dalam perairan 12 Mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan Internasional.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan perbatasan langsung dengan selat Malaka dan Propinsi Sumatra Utara. Kondisi Wilayah Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan adalah merupakan sungai terbesar yang melintasi sejauh 350 KM dari muaranya di Rokan Hilir

hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai masjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lain-lain.

Beberapa kota nelayan di Rokan Hilir seperti : Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi adalah merupakan penghasil ikan terbesar di Rokan Hilir. Sebagian besar hasil perikanan tersebut di ekspor ke luar negeri, seperti : Malaysia dan Singapura, produk utama perikanan rokan Hilir adalah : Ikan Segar, Udang, Ikan Asin, Terasi dan lain-lain.

Pelabuhan-pelabuhan di Rokan Hilir umumnya merupakan pelabuhan rakyat, meskipun pelabuhan seperti Bagan Siapi-api yang telah ada saat ini tidak dapat berkembang secara signifikan. Hal ini dikarenakan tingginya pendangkalan perairan di sekitar pelabuhan. Oleh karena itu pengembangan di sektor perhubungan laut perlu dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pada Sub Dinas Perhubungan Laut, baik dari perbaikan fasilitas, pelayanan, peningkatan sumber daya pegawai, maupun penambahan pegawai serta kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan khususnya di bidang Sub Dinas Perhubungan Laut.

Untuk dapat melakukan pengembangan di sektor Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir telah berusaha melaksanakan beberapa program dalam rangka untuk pengembangan Dinas Perhubungan Laut itu sendiri, khususnya pada Sub Dinas Perhubungan Laut sebagai berikut :

1. Pengembangan fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut
2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Sub Dinas Perhubungan Laut
3. Penambahan jumlah pegawai Sub Dinas Perhubungan Laut
4. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan perhubungan laut
5. Pembinaan terhadap Sub Dinas Perhubungan Laut
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Sub Dinas Perhubungan Laut
7. Pemberian perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Perhubungan Laut

Dari hasil pengamatan pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir ternyata pelaksanaan Program tersebut belum seluruhnya terealisasi, hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya tenaga ahli yang terampil di bidang Perhubungan Laut
2. Kurangnya fasilitas pembangunan laut
3. Kurangnya pelatihan dan Diklat di bidang Perhubungan Laut
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan Pegawai pada Dinas Perhubungan Laut

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas penulis ingin meneliti pelaksanaan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut yang mengkaji tentang : **"Strategi Pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut dalam rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Rokan Hilir"**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, pelaksanaan program Sub Dinas Perhubungan laut untuk pengembangan

dinas tersebut kurang dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat diketahui dari program-program yang telah dibuat belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang terampil di bidang perhubungan laut, dan kurangnya pelaksanaan pelatihan/Diklat di bidang perhubungan laut.

Dari hasil pemantauan tersebut permasalahan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagaimana pengembangan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka Otonomi Daerah.
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui pengembangan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan penerapan Ilmu Administrasi khususnya mengenai pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi.
2. Sebagai informasi bagi instansi terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada Kantor Dinas Perhubungan Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.